



PENDAMPINGAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019*)

Oleh:

**Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM
Firdaus, SP, MSi**

*)Disampaikan pada acara Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Peraturan Bupati Pasaman Tentang Kewenangan Nagari dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pasaman
Lubuk Sikaping, Tanggal 29 Mei 2019

LUARAN DI TINGKAT KABUPATEN

1. Terbentuknya Satgas penurunan stunting ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan peran aktif ketua tim penggerak PKK Kabupaten
2. Tersedianya tim teknis di tingkat Kabupaten antara lain Terdiri dari PT, organisasi profesi, dll
3. Tersedianya data sumberdaya penurunan stunting di tingkat Kabupaten

LUARAN DI TINGKAT KABUPATEN

4. Tersedianya data tentang alokasi sumber dana ke 10 desa sasaran
5. Terlaksananya pemantauan kegiatan Pokja penurunan stunting di tingkat Kecamatan
6. Tersedianya sumber dana penurunan stunting yang berasal dari APBD Perubahan

LUARAN DI TINGKAT KECAMATAN

1. Terbentuknya Pokja penurunan stunting lintas sektor dipimpin oleh Camat dengan wakil-wakil adalah kepala Puskesmas dan ketua tim penggerak PKK Kecamatan, yang ditetapkan dengan Peraturan Camat
2. Tersedianya alat/instrumen dan mekanisme monitoring penurunan stunting di desa sasaran

LUARAN DI TINGKAT KECAMATAN

3. Pokja menyusun laporan kegiatan penurunan stunting kepada Satgas penurunan stunting di Tingkat Kabupaten
4. Pokja melaksanakan diseminasi dari sistem perencanaan dan pengelolaan program stunting ke desa-desa diluar desa prioritas

LUARAN DI TINGKAT DESA/NAGARI

1. Terpilihnya 10 desa lokus stunting
2. Terbentuknya/berfungsinya **minimal** 2 Posyandu (rata-rata 3-5 posyandu) di setiap desa
3. Terlatihnya/dilatih ulangnya 5 kader di setiap Posyandu untuk 4 posyandu terpilih di desa

LUARAN DI TINGKAT DESA/NAGARI

4. Tersedianya daftar keluarga sasaran by name by address yang masuk dalam 1000 HPK (ibu hamil, ibu menyusui, bayi 0-5 bulan, 6-11 bulan dan anak 12-23 bulan) di setiap Posyandu mengikuti sistem yang dimiliki oleh Kemenkes (menggunakan data ePPGBM/ pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat untuk data balita dan ibu hamil).

LUARAN DI TINGKAT DESA/NAGARI

5. PT tidak mengambil data dengan sistem sendiri, untuk memudahkan monitoring dan evaluasi.
6. Tersedianya sarana paket pertolongan gizi (kapsul vit. A, TTD, PMT, dll) di setiap Posyandu
7. Tersedianya sarana KIE (buku KIA, KMS, leaflet yang terkait dengan stunting) di setiap Posyandu (30 set KIE per kabupaten)
8. Tersedianya profil keluarga sasaran untuk dasar alokasi program intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif secara konvergen

LUARAN DI TINGKAT DESA/NAGARI

9. Tersedianya usulan intervensi kepada OPD terkait (intervensi gizi sensitif dan spesifik)
10. Tersedianya ketetapan tentang besaran intervensi gizi sensitif dan spesifik dari berbagai sumber pembiayaan (OPD/dana desa/dll)
11. Terlaksananya monitoring implementasi program penanggulangan stunting di tingkat desa

MATRIKS SASARAN KEGIATAN, IDENTIFIKASI MASALAH INTERVENSI PENCEGAHAN STUNTING DALAM 1000 HPK

No	Sasaran Kegiatan Pencegahan	Masalah	INTERVENSI			
			SPESIFIK	SENSITIF		
				Umum	SKPD Terkait	Keluarga
1	Remaja Putri	Kurus		Edukasi Gizi Seimbang bagi Remaja	Dinkes	
		Obese		Edukasi TTD remaja putri	Dinkes	
		Anemia	Obat cacing, TTD		Dinkes	
2	Catin	Usia menikah < 18 tahun	Menunda kehamilan	Edukasi dan konseling Kesehatan Reproduksi Catin	Dinkes/Kemenag	
				Bimbingan Perkawinan dan Tokoh agama	Kemenag	
				Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kemen PPPA	
		Kurus		Edukasi Gizi Seimbang bagi Catin	Dinkes	
		Obese		Edukasi Gizi Seimbang bagi Catin	Dinkes	
		Anemia	Obat cacing, TTD/MMN Catin		Dinkes	

No	Sasaran Kegiatan Pencegahan	Masalah	INTERVENSI			
			SPESIFIK	SENSITIF		
				Umum	SKPD Terkait	Keluarga
3	Ibu Hamil					
	Trimester 1	Status gizi ibu buruk		Edukasi Gizi Seimbang bagi Bumil	Dinkes	
		Jarak antar kehamilan pendek			Dinkes	
		Tidak konsumsi TTD		Edukasi TTD bagi bumil	Dinkes	
		Kunjungan K1 terlambat			Dinkes	
		Bumil malaria	Lindungi bumil dari malaria		Dinkes	
		Status imunologi ibu rendah			Dinkes	
		Hipertensi dalam kehamilan			Dinkes	
		Trimester 2	Status gizi ibu buruk			Dinkes
	Hipertensi dalam kehamilan					
	Trimester 3	Status gizi ibu buruk			Dinkes	
		Akses jaminan dan pelayanan kesehatan bumil		Menyediakan Jaminan Kesehatan	Dinkes	

No	Sasaran Kegiatan Pencegahan	Masalah	INTERVENSI				
			SPESIFIK	SENSITIF			
				Umum	SKPD Terkait	Keluarga	
4	Ibu menyusui	Status gizi ibu buruk		Edukasi Gizi Busui	Dinkes		
		Jarak kehamilan pendek		Menyediakan akses layanan KB	BKKBN		
5	Bayi 0-6 bulan	BBLR		Revitalisasi Posyandu	Dinkes		
				Pemantauan Pertumbuhan melalui KMS	Dinkes		
		Infeksi Bayi 0-6 bulan		Peningkatan cakupan Imunisasi	Dinkes		
		Menyusui tidak adekuat					
		Tidak dilakukan IMD	Mendorong IMD			Dinkes	
		Tidak dilakukan ASI Eksklusif	Mendorong pemberian ASI eksklusif			Dinkes	

No	Sasaran Kegiatan Pencegahan	Masalah	INTERVENSI			
			SPESIFIK	SENSITIF		
				Umum	SKPD Terkait	Keluarga
6	Bayi 6-12 bulan	Tidak adekuat PMT Bayi		Bina Keluarga Balita	Dinkes/BKKBN	
		PMT sebelum waktunya		Pendampingan praktik pemberian MP-ASI	Dinkes	
		Infeksi berulang pada bayi	Imunisasi		Dinkes	
		Kecacingan	Obat cacing			
		Diare berulang	Suplementasi zink	Penyediaan air minum/air bersih yang aman	Kemen PU&PR	
				Akses sanitasi yang layak	Kemen PU&PR	
				Keberadaan jamban keluarga	Kemen PU&PR	
				Pengolahan limbah rumah tangga	Kemen PU&PR	
		Tidak nafsu makan karena infeksi berulang			Dinkes	
		Kualitas makanan buruk				
		Sosial ekonomi keluarga rendah		Akses bantuan uang tunai untuk keluarga miskin (PKH)	Kemensos	
				Sosialisasi Gizi Bagi anak dan keluarga	Kemen PPPA	
		Tidak memberikan ASI sampai anak usia 2 tahun		Akses bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu	Kemensos	
Bayi KKP (kualitas dan kuantitas makanan tidak adekuat)		Akses fortifikasi bahan pangan	Kemperin			
		Penyediaan akses terhadap pangan bergizi	Kementan			
Defisiensi vit A	Pemberian kapsul vitamin A		Dinkes			

No	Sasaran Kegiatan Pencegahan	Masalah	INTERVENSI			
			SPESIFIK	SENSITIF		
				Umum	SKPD Terkait	Keluarga
7	Bayi 12-24 bulan	Infeksi berulang pada bayi				
		Diare berulang	Suplementasi zink	Penyediaan akses PAUD	Kemendikbud	
				Promosi stimulasi anak usia dini dan pemantauan tumbuh kembang		
				Bantuan sanitasi sekolah	Kemendikbud	
				Penguatan UKS	Kemendikbud	
				Edukasi dan Pendampingan Masyarakat (Program KKN)	KemeristekDikti	
		Gizi Buruk		Penyediaan konseling pengasuhan anak bagi orang tua		
				Gerakan Makan Ikan/Promosi Hasil Perikanan dan Kelautan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
				Penyediaan akses terhadap pangan bergizi	Kementan	
				Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)	B POM	

TERIMA KASIH